

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tercantum dalam perencanaan strategis (jangka menengah), yang dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahunan, kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja, penetapan pengukuran kinerja, pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja.

Hasil yang utama dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintah dalam mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

1.1. Latar Belakang

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), terdapat 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara dimana salah satunya adalah azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjabarkan azas akuntabilitas tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pedoman-pedoman

tersebut diatur bahwa SAKIP terdiri dari 4 komponen, yaitu : perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Sesuai dengan pasal 126 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Wali Kota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Satuan Pemerintah Kecamatan secara kewilayahan memiliki jangkauan pelayanan yang lebih dekat terhadap masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Rencana Strategis Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sangat perlu diaplikasikan antara konsep Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Prima, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik merupakan sebuah keniscayaan yang harus dan perlu diselenggarakan dalam upaya mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kecamatan Taliwang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran. Oleh karenanya diwajibkan untuk membuat LKjIP SKPD Tahun 2019, dengan maksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun pada Tahun Anggaran 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Laporan Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Taliwang yang merupakan dokumentasi hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) serta hasil rangkuman masing-masing kegiatan Sekretariat Kecamatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Kecamatan Taliwang sesuai dengan visi dan misi daerah yang dirujuk dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021, antara lain :

"Terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong royong".

1.2. Landasan Penyusunan LKjIP

Landasan Penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut :

- Landasan Idiil Pancasila
- Landasan Konstitusional UUD 1945
- Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat

1. Tugas

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas pemerintahan umum yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan;
- i. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- j. Pembinaan terhadap tenaga fungsional di lingkungan kecamatan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

1. Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, keuangan, kepegawaian, administrasi dan umum.

2. Fungsi Sekretaris Kecamatan

Untuk dapat melaksanakan tugas, maka Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas sub bagian;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja kecamatan;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- e. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas sub bagian;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan keuangan Kecamatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3.3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu camat dalam urusan pemerintahan bidang pemerintahan.

Rincian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- f. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- g. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;

- h. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
- i. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- j. Melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melaksanakan tugas pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- m. Melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah kerjanya;
- n. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan seksi;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban.

Rincian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- d. Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- f. Memfasilitasi pencegahan dan pengurangan bencana alam;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan seksi;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3.5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam urusan Pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.

Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
- c. Melaksanakan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3.6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat.

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3.7. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam urusan pemerintahan bidang pelayanan umum.

Rincian tugas Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan umum di wilayah kerja kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;

- f. Melaksanakan standar pelayanan minimal dibidang pelayanan umum;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4. Struktur Organisasi

Susunan Tata Kerja dan Susunan Organisasi

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- g. Seksi Pelayanan Umum

1.5. Susunan Kepegawaian

Keadaan dan susunan pegawai pada Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Susunan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menurut Jabatan Tahun 2018 :

**Susunan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Taliwang
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019
(Periode Januari tahun 2019)**

No	Nama Pegawai	NIP	Gol/ Ruang	Jabatan
1	Suryaman,S.STP	19820320 200112 1 003	Pembina, IV/a	Camat Taliwang
2	Jiswati,SH.,MH	19640819 199003 1 004	Pembina,IV/a	Sekcam
3	Najamuddin,S.Pt	19710706 1991 02 1 003	Penata Tk.I ,III/d	Kasi Pelayanan Umum

4	Putri Bana,S.AP	19730716 200701 1 026	Penata Tk I, III/d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
5	Habiburrahman H,S.Psi	19740724 200701 1 017	Penata Tk I, III/d	Kasi Trantib
6	Nurifa Irma Suryani,S.STP	19801224 200901 1 010	Penata, III/c	Kasi Pemerintahan
7	Kamaria,S.AP	19660108 200701 2 014	Penata MudaTk I, III/b	Kasi Kesejahteraan Rakyat
8	Nurkabah	19700605 199702 2 003	Penata Muda Tk I, III/b	Kasubbag penyusunan Program dan keuangan
9	Puspita Sari Dewi	19820313 200801 2 017	Penata Tk I, III/b	Kasubbag umum kepegawaian
10	Agus Sofyan	19780802 200701 1 017	Pengatur Muda Tk I II/c	Staf
11.	Abdul Rizal	19811230 200801 1010	Pengatur, II/c	Staf
12.	Ninie Wahyuni Idias	19820216 200901 2 004	Pengatur,II/c	Staf
13	Hendra Kusmayadi	19830530 201410 1 003	Pengatur Muda Tk,I II/b	Staf
14	Muhammad Zain,SE	19740107 201001 1 001	Penata Muda III/a	Staf
15	Zakaria	19631231 198906 1 008	Pengatur Tk I II/c	Staf
16	Nurullah,S.IP	19860214 201410 1 002	Penaata Muda III/a	Staf
17	Nuraini	19750714 201410 2 003	Juru I/c	Staf

**Susunan Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon
Kantor Kecamatan Taliwang**

No	Uraian	Eselon	Jumlah Personil		Ket
			Terisi	Belum Terisi	
1	Camat	III a	1	-	
2	Sekretaris Kecamatan	III b	1	-	
3	Kasi Pelayanan Umum	IV a	1		
4	Kasi Pemerintahan	IV a	1	-	
5	Kasi Trantib	IV a	1	-	

6	Kasi Kesra	IV/a	1	-	
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV a	1	-	
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV b	1	-	
9	Kasubag Penyusunan program dan Keuangan	IV b	1	-	
Jumlah			9	-	

Selain jumlah Pegawai Negeri sipil yang menduduki jabatan eselon di Kantor Kecamatan Taliwang terdapat juga susunan pegawai ASN/PTT/Tenaga Kontrak maupun tenaga kegiatan yang bekerja membantu dalam seksi-seksi yang telah di atur dalam susunan kepegawaian dikantor Kecamatan Taliwang

Adapun susunan pegawai pada seksi sebagai berikut :

**Susunan Kepegawaian Pada Seksi Pemerintahan
Kantor Camat Taliwang
(Periode Januari tahun 2019)**

No	Uraian	Jumlah Personil		Ket
		PNS	Non PNS	
1	Kepala Seksi	1	-	
2	Staf PNS	1	-	
3	Staf Non PNS	-	1	PTT
Jumlah		2	1	3

**Susunan Kepegawaian Pada Seksi Kesejahteraan Rakyat
Kantor Camat Taliwang
(Periode Januari tahun 2019)**

No	Uraian	Jumlah Personil		Ket
		PNS	Non PNS	
1	Kepala Seksi	1	-	
2	Staf PNS	-	-	
3	Staf Non PNS	-	3	PTT
Jumlah		1	3	4

**Susunan Kepegawaian Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Kantor Camat Taliwang
(Periode Januari tahun 2019)**

No	Uraian	Jumlah Personil		Ket
		PNS	Non PNS	
1	Kepala Seksi	1	-	
2	Staf PNS	-	-	
3	Staf Non PNS	-	1	PTT
Jumlah		1	1	2

**Susunan Kepegawaian Pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Kantor Camat Taliwang
(Periode Januari tahun 2019)**

No	Uraian	Jumlah Personil		Ket
		PNS	Non PNS	
1	Kepala Seksi	1	-	
2	Staf PNS	1	-	
3	Staf Non PNS	-		
Jumlah		2		2

**Susunan Kepegawaian Pada Seksi Pelayanan Umum
Kantor Camat Taliwang
(Periode Januari tahun 2019)**

No	Uraian	Jumlah Personil		Ket
		PNS	Non PNS	
1	Kepala Seksi	1	-	
2	Staf PNS	-	-	
3	Staf Non PNS	-	3	PTT
Jumlah		1	3	4

**Susunan Kepegawaian Pada Subbagian Umum Kepegawaian
Kantor Camat Taliwang
(Periode Januari tahun 2019)**

No	Uraian	Jumlah Personil		Ket
		PNS	Non PNS	
1	Kepala Subbagian	1	-	
2	Staf PNS	2	-	
3	Staf Non PNS	-	6	PTT
Jumlah		3	6	9

**Susunan Kepegawaian Pada Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan
Kantor Camat Taliwang
(Periode Januari tahun 2019)**

No	Uraian	Jumlah Personil		Ket
		PNS	Non PNS	
1	Kepala Subbagian	1	-	
2	Staf PNS	2	-	
3	Staf Non PNS	-	2	PTT
Jumlah		3	2	5

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya aparat yang profesional	Aparat Kantor Kecamatan terlatih	100 %
		Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek	5 orang
2	Tersedianya kebijakan yang jelas	Jumlah dokumen kebijakan	40 Dokumen
		Kesesuaian dokumen kebijakan dengan peraturan perundang-undangan	40 Dokumen
3	Tersedianya data dan informasi yang memadai	Jumlah data kesra, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, trantib dan sekretariat	75 Data
		informasi tentang pelayanan umum dan adminitrasi kecamatan	100 %
4	Terbinanya lembaga Pemerintahan Desa secara berkesinambungan	Jumlah desa/kelurahan binaan	9 Desa, 7 Kelurahan
		Rasio pegawai terhadap jumlah desa binaan	4 org/desa
5	Terbinanya lembaga kesejahteraan rakyat dan keagamaan secara berkesinambungan	Jumlah desa/kelurahan binaan	9 Desa, 7 Kelurahan
		Jumlah peserta MTQ	55 orang
		Persentase keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan keagamaan	100 %
6	Terbinanya lembaga pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan	Jumlah desa/kelurahan binaan	9 Desa, 7 Kelurahan
		Persentase keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan kecamatan	100 %
		Jumlah Tim PDPGR Kecamatan	130 orang
7	Terbinanya lembaga masyarakat secara berkesinambungan	Jumlah desa/kelurahan binaan	9 Desa, 7 Kelurahan
		Persentase kepedulian masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban wilayah	100 %
8	Tersedianya laporan keuangan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan	5 dokumen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah dokumen keuangan	6 dokumen
		Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan	4 dokumen
9	Tersusunnya program yang terpadu	Jumlah program prioritas kecamatan	6 program
		Kesesuaian program dengan IKU, Renstra dan Renja kecamatan	100 %
10	Tersedianya laporan kepegawaian tepat sasaran	Jumlah pegawai PNS dan Non PNS	37 orang
		Indeks kebutuhan pegawai	100 %
		Tingkat kedisiplinan pegawai	100 %
11	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Jumlah aset tetap	12 aset
		Jumlah aset dengan kondisi rusak berat, sedang dan ringan	30 aset
		Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kecamatan	100 %

Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Setelah Perubahan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 342.439.800,-	Kecamatan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 127.477.000,-	Kecamatan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 17.390.000,-	Kecamatan
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 37.669.000,-	Kecamatan
5	Program Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp. 15.105.000,-	Kecamatan
6	Program Peningkatan Pendidikan Kesehatan Masyarakat	Rp. 19.597.000,-	Kecamatan
7	Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Desa	Rp. 104.723.350,-	Kecamatan
8	Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	Rp. 224.190.600,-	Kecamatan
9	Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 175.178.000,-	Kecamatan

10	Program Peningkatan Koordinasi Pelayanan Umum Kecamatan (PATEN)	Rp. 19.411.750,-	Kecamatan
11	Program Peningkatan Koordinasi Kondusifitas Wilayah	Rp. 48.330.000,-	Kecamatan
12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 270.478.604,-	Kel. Kuang
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 4.500.000,-	Kel. Kuang
	Peningkatan sarana dan Prasarana	Rp. 1.120.230.000,-	Kel.Kuang
	Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	Rp. 113.059.500,-	Kel. Kuang
	Program Peningkatan Koordinasi pemberdayaan Masyarakat	Rp. 66.659.448,-	Kel. Kuang
	Program Peningkatan koordinasi Kondusifitas Wilayah	Rp. 7.245.000,-	Kel. Kuang
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 54.982.000,-	Kel. Kuang
	Program Pelayanan Administrasi	Rp. 305.129.650,-	Kel. Dalam
	Peningkatan sarana dan prasarana	Rp. 1.155.074.000,-	Kel. Dalam
	Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Desa	Rp. 44.858.350,-	Kel. Dalam
	Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	Rp. 22.266.000,-	Kel. Dalam
	Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 59.360.000,-	Kel. Dalam
	Program Peningkatan Koordinasi Kondusifitas Wilayah	Rp. 30.586.000,-	Kel. Dalam
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp. 20.138.000,-	Kel. Dalam
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 309.317.500,-	Kel. Sampir
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 33.603.000,-	Kel. Sampir
	Peningkatan sarana dan prasarana	Rp. 1.054.467.500,-	Kel. Sampir
	Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Desa	Rp. 70.152.000,-	Kel. Sampir
	Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	Rp. 30.067.000,-	Kel. Sampir
	Program Peningkatan koordinasi Kondusifitas Wilayah	Rp. 9.962.500,-	Kel. Sampir
	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp. 120.744.500,-	Kel. Sampir

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 315.050.000,-	Kel. Bugis
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 56.189.000,-	Kel. Bugis
	Peningkatan sarana dan prasarana	Rp. 1.128.284.000,-	Kel. Bugis
	Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Desa	Rp. 53.751.000,-	Kel. Bugis
	Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	Rp. 32.905.000,-	Kel. Bugis
	Program Peningkatan koordinasi Kondusifitas Wilayah	Rp. 10.605.000,-	Kel. Bugis
	Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 36.900.000	Kel. Bugis
	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp. 46.928.000,-	Kel. Bugis
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 286.541.524,-	Kel. Menala
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 46.573.400,-	Kel. Menala
	Peningkatan sarana dan prasarana	Rp. 1.086.642.000,-	Kel. Menala
	Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Desa	Rp. 20.205.076,-	Kel. Menala
	Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	Rp. 31.550.000,-	Kel. Menala
	Program Peningkatan koordinasi Kondusifitas Wilayah	Rp. 26.280.000,-	Kel. Menala
	Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 63.050.000,-	Kel. Menala
	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp. 88.570.000,-	Kel. Menala
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 309.342.500,-	Kel. Tebet
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 4.000.000,-	Kel. Tebet
	Peningkatan sarana dan prasarana	Rp. 1.111.627.000,-	Kel. Tebet
	Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Desa	Rp. 28.590.000,-	Kel. Tebet
	Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	Rp. 28.000.000,-	Kel. Tebet
	Program Peningkatan koordinasi Kondusifitas Wilayah	Rp. 10.080.000,-	Kel. Tebet
	Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 81.592.500,-	Kel. Tebet
	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp. 63.585.000,-	Kel. Tebet

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 309.342.500,-	Kel. Tebet
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 4.000.000,-	Kel. Tebet
	Peningkatan sarana dan prasarana	Rp. 1.111.627.000,-	Kel. Tebet
	Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Desa	Rp. 28.590.000,-	Kel. Tebet
	Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	Rp. 28.000.000,-	Kel. Tebet
	Program Peningkatan koordinasi Kondusifitas Wilayah	Rp. 10.080.000,-	Kel. Tebet
	Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 81.592.500,-	Kel. Tebet
	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp. 63.585.000,-	Kel. Tebet
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 271.280592,-	Kel. Arken
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 49.067.000,-	Kel. Arken
	Peningkatan sarana dan prasarana	Rp. 1.071.590.500,-	Kel. Arken
	Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Desa	Rp. 20.700.000,-	Kel. Arken
	Program Peningkatan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	Rp. 28.100.000,-	Kel. Arken
	Program Peningkatan koordinasi Kondusifitas Wilayah	Rp. 5.000.000,-	Kel. Arken
	Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 65.250.408,-	Kel. Arken
	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp. 103.613.500,-	Kel. Arken
	Jumlah	Rp. 12.725.584.000,-	

2.2 RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan suatu proses awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntunan strategi lokal, nasional dan global dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun. Pemerintah tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,

peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategi memiliki beberapa komponen yang terdiri atas : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang dijabarkan dalam bentuk Kebijakan dan Program Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

2.2.1. Visi dan Misi

Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat, pemerintah Kecamatan Taliwang sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari visi Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu :

“Terwujudnya Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan Menuju Kabupaten Sumbawa Barat Sejahtera Berlandaskan Gotong Royong”

Berdasarkan perumusan visi Kabupaten Sumbawa Barat tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi umum Kecamatan Taliwang serta perkiraan potensi yang dapat dikembangkan di masa datang, maka dirumuskan visi Kecamatan Taliwang adalah :

”Terwujudnya Kecamatan Taliwang yang Unggul dan Dinamis Menuju Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat Sejahtera Berlandaskan Gotong Royong”.

Pernyataan visi tersebut terkandung pengertian sebagai berikut :

- 1.) Koordinasi dan Pelayanan Prima, berarti koordinasi merupakan fungsi utama Kecamatan dan pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan ramah, cepat, mudah dan transparan;
- 2.) Masyarakat Sejahtera, berarti suatu keadaan dimana secara fisik dan non fisik kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama.
- 3.) Aman, berarti keamanan wilayah sangat menentukan dalam upaya menjalankan roda pemerintahan di kecamatan.
- 4.) Beriman Dan Bertaqwa, berarti dalam upaya pembangunan pemerintah Kecamatan perlu diimbangi dengan meningkatkan iman dan taqwa aparat pemerintah dan masyarakat secara bersama-

sama dengan berbagai upaya seperti melaksanakan baca alquran bersama, kegiatan taushiyah dan shalat berjamaah di masjid.

Dalam rangka mewujudkan visi kecamatan sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut :

- 1.) Meningkatkan keselarasan pembinaan Pemerintahan Desa;
- 2.) Meningkatkan keselarasan pembinaan kesejahteraan rakyat dan keagamaan masyarakat;
- 3.) Meningkatkan keselarasan pemberdayaan masyarakat;
- 4.) Meningkatkan ketertiban pelayanan terpadu kecamatan;
- 5.) Meningkatkan keselarasan penanganan kondusivitas wilayah kecamatan;
- 6.) Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pemerintah Kecamatan dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati Sumbawa Barat periode 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselarasan koordinasi dengan pemerintahan desa;
2. Meningkatkan pemenuhan pelayanan prima kecamatan;
3. Meningkatkan koordinasi kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan wilayah kecamatan yang kondusif;
5. Meningkatkan kerjasama dalam wadah gotong royong;

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka ditetapkan beberapa sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya keselarasan pembinaan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatnya keselarasan pembinaan kesejahteraan rakyat dan keagamaan;
- c. Meningkatnya keselarasan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatnya ketertiban pelayanan terpadu kecamatan;
- e. Meningkatnya keselarasan penanganan kondusifitas wilayah kecamatan;
- f. Meningkatnya kelancaran dan ketertiban pelayanan internal

2.2.3. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang sifatnya taktis strategis yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Kecamatan, Seksi

Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Pelayanan Umum. Kebijakan yang ditetapkan untuk mendorong dan memfokuskan pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang diambil antara lain :

- a. Peningkatan edukasi aparaturnya kecamatan;
- b. Optimalisasi pembinaan dan monitoring Pemerintahan Desa;
- c. Peningkatan koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat;
- d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dalam wadah gotong royong;
- e. Optimalisasi peran kelembagaan desa;
- f. Fasilitasi prasarana dan fasilitas umum yang ada di wilayah kecamatan;
- g. Peningkatan kesadaran dalam penegakan peraturan daerah;
- h. Meningkatkan pembinaan keagamaan dan sosial budaya masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, seni dan budaya.

2.3. RENCANA KINERJA

Rencanan Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Taliwang Tahun 2018 disusun berdasarkan IKU Kecamatan Taliwang periode 2016-2021 yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang ingin dicapai
2. Indikator kinerja sasaran dan target capaiannya.
3. Program
4. Kegiatan
5. Indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program merupakan wujud nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang telah ditetapkan dan disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

Adapun Program Kantor Camat Taliwang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Program Penataan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran I : Meningkatnya efektivitas koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2016	2019			Periode Akhir Renstra	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	%
Aparat Seksi Pemerintahan	Jumlah	2	4	2	50,00	4	100
Regulasi yang jelas	Dokumen	2	10	8	80,00	10	100
Data dan dokumen	Data	10	15	15	100,00	40	37,50
Lembaga Pemerintahan Desa	Lembaga	10	10	10	100,00	20	50,00
Peralatan dan perlengkapan	Unit	-	1	1	100,00	2	50,00

Sasaran II : Meningkatnya efektivitas koordinasi kesejahteraan dan keagamaan masyarakat kecamatan

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2016	2019			Periode Akhir Renstra	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	%
Aparat Seksi Kesra	Jumlah	1	5	3	75,00	5	100
Regulasi yang jelas	Dokumen	3	10	5	50,00	15	66,67
Data dan dokumen	Data	10	15	15	100,00	40	37,50
Lembaga keagamaan dan masyarakat	Lembaga	2	5	5	100,00	30	16,67
Peralatan dan perlengkapan	Unit	-	1	1	100,00	2	50,00

Sasaran III : Meningkatnya efektivitas koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2016	2019			Periode Akhir Renstra	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	%
Aparat Seksi Pemberdayaan	Jumlah	1	3	3	100,00	4	75,00
Regulasi yang jelas	Dokumen	3	10	5	50,00	15	66,67
Data dan dokumen	Data	10	15	15	100,00	60	25,00
Lembaga pemberdayaan masyarakat	Lembaga	2	10	10	100,00	50	20,00
Peralatan dan perlengkapan	Unit	-	1	1	100,00	2	50,00

Sasaran IV : Meningkatnya kualitas pelayanan admisnitrasi terpadu kecamatan

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2016	2019			Periode Akhir Renstra	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	%
Aparat Seksi Pelayanan Umum	Jumlah	-	3	3	100,00	4	75,00
Regulasi yang jelas	Dokumen	-	1	1	100,00	10	10,00
Data dan dokumen	Data	-	100	50	50,00	500	20,00
Peralatan dan perlengkapan	Unit	-	-	-	-	3	-

Sasaran V : Meningkatnya efektivitas koordinasi keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2016	2019			Periode Akhir Renstra	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	%
Aparat Seksi Trantib	Jumlah	1	3	3	100,00	4	75,00
Regulasi yang jelas	Dokumen	2	10	5	50,00	15	66,67
Data dan dokumen	Data	2	10	10	100,00	20	50,00

Lembaga keamanan	Lembaga	2	10	10	100,00	50	20,00
Peralatan dan perlengkapan	Unit	-	1	1	100,00	2	50,00

Sasaran VI : Meningkatnya kualitas dan kuantitas laporan keuangan dan program SKPD

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2016	2019			Periode Akhir Renstra	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	%
Laporan Keuangan	Laporan	1	4	4	100,00	4	100
Dokumen Perencanaan	Dokumen	3	6	6	100,00	9	66,67
Aparatur bagian program dan keuangan	Jumlah	3	4	4	100,00	4	100
Data dan Dokumen	Data	5	10	10	100,00	10	100

Sasaran VII : Meningkatnya efektivitas pelayanan perkantoran

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2016	2019			Periode Akhir Renstra	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	%
Laporan Kepegawaian	Laporan	1	4	4	100,00	4	100
Peralatan dan Fasilitas Kantor	Unit	6	7	7	100,00	20	35,00
Data dan Dokumen	Data	2	6	6	100,00	10	60,00
Aparatur bagian Umum dan Kepegawaian	Jumlah	3	4	4	100,00	4	100

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Solusi yang dilakukan

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) didasarkan atas hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dalam suatu sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN I s/d V

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
 - 1) Meningkatnya sistem pengelolaan administrasi pemerintahan kecamatan dan desa.
 - 2) Terbentuknya aparatur pemerintahan kecamatan dan desa yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
 - 3) Terbentuknya tim yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada setiap desa sehingga persentase pembayaran semakin meningkat.
 - 4) Adanya petugas yang melakukan pendataan aset-aset desa.
 - b. Pembinaan Keagamaan/Pelaksanaan STQ/MTQ
 - 1) Terlaksananya pelatihan (training) bagi qori' dan qori'ah di tingkat kecamatan.
 - 2) Terlaksananya kegiatan pembinaan keagamaan dengan mengikuti kegiatan MTQ di tingkat kabupaten.
 - 3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas qori' dan qori'ah di Kecamatan Taliwang.
 - c. Pelaksanaan Musrenbang

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya Musrenbang desa dan kecamatan sehingga terhimpun aspirasi masyarakat untuk kegiatan pembangunan selanjutnya.
 - d. Rapat Koordinasi Muspika dan Pemantauan Wilayah
 - 1) Terciptanya koordinasi yang intensif antara pemerintah kecamatan dengan unsur Muspika.
 - 2) Terlaksananya pemantauan wilayah untuk mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.
 - e. Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya

Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah terlaksananya pawai adat, lomba-lomba yang dilaksanakan guna memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan tujuan melestarikan budaya daerah.

f. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Terlaksananya pembinaan ketertiban dan ketentraman sehingga mendukung peningkatan kesadaran masyarakat untuk selalu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

2) Terciptanya lingkungan yang aman dan tentram dalam masyarakat dengan semakin menurunnya berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat.

g. Pembinaan Pemuda dan Olahraga

1) Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan kepemudaan.

h. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Penataan Lingkungan

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan lembaga-lembaga desa dan pembinaan kelompok usaha sehingga mampu bersaing di bidangnya.

i. Penataan dan Pembinaan Administrasi Pelayanan Terpadu

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terciptanya aparatur kecamatan yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengurusan perizinan maupun non perizinan.

Faktor-Faktor yang Mendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja Kebijakan ini adalah :

- Didukung oleh kepala seksi, kepala sub bagian dan aparatur Kantor Camat Taliwang yang berpengalaman dan berdedikasi dalam menata pemerintahan.
- Meningkatkan dukungan dan keinginan aparatur desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- Meningkatnya partisipasi pemerintah desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan.
- Adanya respon positif dari masyarakat terhadap perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa.
- Dukungan unsur Muspika, instansi terkait dan partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya keamanan serta ketertiban di masyarakat.
- Meningkatkan pengetahuan lembaga-lembaga desa dan kelompok usaha di dalam masyarakat.
- Adanya aparatur kecamatan yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Kebijakan ini adalah :

- Minimnya anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum.
- Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan desa yang masih kurang mengakibatkan belum optimalnya pembinaan.
- Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan.
- Minimnya sosialisasi tentang pertanahan.
- Masih rendahnya kemampuan dari lembaga-lembaga desa dan kelompok usaha dalam meningkatkan usaha di bidangnya masing-masing.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana PATEN

Strategi Pemecahan Masalah tersebut adalah :

- Meningkatkan anggaran pembinaan sehingga pelaksanaan pemerintahan kecamatan dan desa dapat meningkat.
- Pelatihan aparatur pemerintahan desa.
- Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan Musrenbangdes.
- Meningkatkan pembinaan dan evaluasi hasil pembangunan desa.
- Peningkatan sosialisasi tentang pertanahan.

- Pemahaman terhadap kebijakan dan aturan-aturan masih perlu ditingkatkan.
- Pelatihan bagi kelompok usaha.
- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

SASARAN VI

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1) Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kantor Camat Taliwang.
 - 2) Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - 1) Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun pada Kantor Camat Taliwang.
 - 2) Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja Program ini adalah :

- Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi, kepala sub bagian dan aparatur Kantor Camat Taliwang dalam pengelolaan keuangan.
- Setiap laporan administratif, fungsional serta laporan fisik kegiatan menggunakan aplikasi Simda sehingga pembuatan laporan lebih efektif dan efisien.

Faktor Penghambat Pencapaian Nilai Akhir Kinerja Program berupa :

- Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti bimbingan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan.
- Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan

Strategi Pemecahan Masalah tersebut adalah :

- Pendidikan dan pelatihan teknis guna membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam menangani administrasi dan pengelolaan keuangan.
- Penambahan staf/aparatur yang menangani administrasi keuangan.
- Meningkatkan sinergisitas antara pelaporan aset dan keuangan

2. Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari beberapa kegiatan :

a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Keberhasilan yang dicapai dari Kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD adalah tersusunnya rencana kerja untuk 1 (satu) tahun anggaran yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA).

b. Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen RKA/RKPA dan DPA/DPPA Kantor Camat Taliwang yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun.

c. Penyusunan Renstra SKPD

Keberhasilan yang dicapai dari kegiatan penyusunan Renstra SKPD adalah tersusunnya Renstra untuk 5 (lima) tahun ke depan yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja, RKA dan DPA.

Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja Program ini adalah :

- Adanya koordinasi yang melibatkan internal aparatur Kantor Camat Taliwang dalam perencanaan kegiatan penyusunan Renstra, Renja, IKU, RKT dan PK.
- Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA menggunakan sistem/aplikasi sehingga lebih efektif dan efisien.

Faktor Penghambat Pencapaian Nilai Akhir Kinerja Program berupa :

- Data dan dokumen pendukung perencanaan yang belum memadai.
- Regulasi tentang perencanaan yg selalu mengalami perubahan.

Strategi Pemecahan Masalah tersebut adalah :

- Pendidikan dan pelatihan teknis guna membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam menangani perencanaan program dan kegiatan.
- Melaksanakan Perencanaan sesuai dengan regulasi yang ada.
- Peningkatan kualitas aparatur perencana di SKPD.

SASARAN VII

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Alat Tulis Kantor

- 1) Tersedianya alat tulis kantor pada masing-masing seksi dan sub bagian.
- 2) Terlaksananya kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran pada setiap seksi dan sub bagian.

b. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

- 1) Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas aparatur.
- 2) Terlaksananya studi strategis tentang PATEN.

c. Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran

- 1) Peningkatan pengelolaan administrasi tata usaha perkantoran.
- 2) Tertatanya administrasi umum dan kearsipan.

d. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

- 1) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke instansi-instansi teknis di kabupaten yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di Kantor Camat Taliwang.

- 2) Terlaksananya pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis bagi aparatur yang dilaksanakan di kabupaten.

Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja Program ini adalah :

- Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi, kepala sub bagian dan aparatur Kantor Camat Taliwang dalam hal penataan administrasi perkantoran.
- Peningkatan partisipasi/kesadaran aparatur Kantor Camat Taliwang dalam penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris dan non inventaris.
- Peningkatan pengelolaan administrasi dilaksanakan dengan efektif, efisien dan transparan.

Faktor Penghambat Pencapaian Nilai Akhir Kinerja Program berupa :

- Minimnya ketersediaan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- Keterbatasan peralatan dan fasilitas kantor pendukung pelaksanaan pekerjaan.

Strategi Pemecahan Masalah tersebut adalah :

- Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terprogram dan berkelanjutan.
- Meningkatkan penambahan anggaran agar sasaran dapat tercapai.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
 - 1) Tersedianya peralatan dan fasilitas kantor.
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan/Gedung/Gudang
 - 1) Tersedianya peralatan kebersihan gedung kantor.
 - 2) Terpeliharanya gedung kantor.
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 1) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.

2) Terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional.

Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja Program ini adalah :

- Adanya koordinasi yang melibatkan semua aparatur Kantor Camat Taliwang dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan skala prioritas.
- Adanya kerjasama dari semua aparatur Kantor Camat Taliwang dalam menjaga kebersihan kantor.
- Peningkatan kesadaran aparatur Kantor Camat Taliwang dalam penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris dan non inventaris.

Faktor Penghambat Pencapaian Nilai Akhir Kinerja Program berupa :

- Minimnya ketersediaan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- Masih kurangnya kendaraan dinas/operasional untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada.
- Rumitnya prosedur dalam melakukan pemeliharaan/service kendaraan dinas/operasional.

Strategi Pemecahan Masalah tersebut adalah :

- Meningkatkan penambahan anggaran agar sasaran dapat tercapai.
- Penambahan kendaraan dinas/operasional guna mendukung program dan kegiatan.
- Diharapkan kedepan agar biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional berada pada masing-masing SKPD.

B. Realisasi Anggaran

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah termasuk dalam kriteria penilaian yang sangat berhasil dikarenakan realisasi yang dicapai sebesar 86,82%. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Persentase capaian : 98,21%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp.124.688.863 ,-
Realisasi : Rp. 122.452.001,-
- Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor pada masing-masing Seksi dan Sub Bagian
- Hasil : Tertatanya Tertib Administrasi dan terpenuhinya ATK pada masing-masing Seksi dan Sub Bagian

b. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Persentase capaian : 98,11%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 370.460.000,-
Realisasi : Rp. 363.442.900,-
- Keluaran : Terselenggaranya Bimbingan Teknis Aparatur
- Hasil : Meningkatnya Kualitas Aparatur Kecamatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah program yang termasuk dalam kriteria penilaian sangat berhasil dengan realisasi sebesar Rp. 997.956.348,- atau 87,30 % dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 871.197.695,-. Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor

Persentase capaian : %

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 320.517.261,-
Realisasi : Rp. 306.407.261,-

- Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Kantor
 - Hasil : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Tupoksinya masing-masing
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan/Gedung/Gudang
- Persentase capaian : 100%
- Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil
- Uraian keberhasilan :
- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 2.278.000,-
 - Realisasi : Rp. 2.278.000,-
 - Keluaran : Tersedianya sarana prasarana dan peralatan kebersihan
 - Hasil : Terpenuhinya sarana prasarana dan terpeliharanya kebersihan gedung kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Persentase capaian : 95,56%
- Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil
- Uraian keberhasilan :
- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 23.309.400,-
 - Realisasi : Rp. 22.169.200,-
 - Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Hasil : Terciptanya Kenyamanan bagi Aparatur Kecamatan dan terpenuhinya pajak surat kendaraan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dalam rangka pemenuhan sarana pendukung peningkatan disiplin PNS di kantor Kecamatan Taliwang.

Realisasi program ini sebesar 100% dari total anggaran dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Mesin / Kartu Absensi

Persentase capaian : 100%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 4.560.973,-
Realisasi : Rp. 4.560.973,-
- Keluaran : Tersedianya absen sidik jari
- Hasil : Terlaksananya pengadaan absen sidik jari

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah program yang diciptakan untuk mendukung pelaporan yang harus dibuat untuk pertanggungjawaban kepada pimpinan atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang ada pada Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Program ini termasuk kriteria penilaian sangat berhasil karena realisasinya sebesar 100% dari total rencana anggaran yang telah ditentukan. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Persentase capaian : 100%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 3.750.000,-
Realisasi : Rp. 3.750.000,-
- Keluaran : Tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Hasil : Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD untuk dilaporkan ke Kabupaten

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Persentase capaian : 100%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 1.500.000,-
- Realisasi : Rp. 1.500.000,-
- Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Hasil : Terdapatnya Laporan Keuangan Akhir Tahun sebagai Bahan Evaluasi dan Pengendalian Penggunaan Anggaran

5. Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program untuk mendukung terlaksananya perencanaan kegiatan pada Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Program ini termasuk kriteria penilaian sangat berhasil karena realisasinya sebesar 100% dari total rencana anggaran yang telah ditentukan. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Persentase capaian : 100%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 400.000,-
- Realisasi : Rp. 400.000,-
- Keluaran : Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
- Hasil : Tersedianya Rencana Kerja SKPD sebagai Pedoman Kerja Kegiatan Tahun Anggaran 2018

b. Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD

Persentase capaian : 100%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 2.822.500,-
- Realisasi : Rp. 2.822.500,-
- Keluaran : Tersusunnya RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
- Hasil : Tersedianya RKA/RKPA dan DPA/DPPA sebagai Acuan Kerja SKPD dalam Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat

c. Penyusunan Renstra SKPD

Persentase capaian : 100%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 6.700.000,-
- Realisasi : Rp. 6.700.000,-
- Keluaran : Tersusunnya Renstra SKPD
- Hasil : Tersedianya Renstra SKPD sebagai Pedoman Program Kerja SKPD Tahun 2016-2021

6. Program Penataan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan terhadap penyelenggaraan hari – hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan di Kecamatan dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Capaian realisasi anggaran program ini sebesar 100% yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Kabupaten Sumbawa Barat

Persentase capaian : 100%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 2.250.000,-
- Realisasi : Rp. 2.250.000,-
- Keluaran : Terlaksananya kegiatan-kegiatan lomba menyambut Harla KSB

- Hasil : Tersedianya anggaran dan partisipasi masyarakat meningkat

b. Perayaan Hari-hari Besar Nasional

Persentase capaian : 100%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 81.975.000,-
Realisasi : Rp. 81.975.000,-
- Keluaran : Terselenggaranya perayaan hari-hari besar nasional
- Hasil : Tersedianya anggaran dan partisipasi pemerintah kecamatan

7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program ini ditujukan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat pembinaan dan koordinasi yang intensif dengan semua instansi pada tingkat kecamatan. Program ini termasuk dalam kriteria penilaian sangat berhasil dengan realisasi sebesar Rp. 197.660.000,- atau 99,62% dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 198.410.000,-. Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

Persentase capaian : 100%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 19.500.000,-
Realisasi : Rp. 19.500.000,-
- Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, Monitoring, Evaluasi dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan,

Pembinaan Perangkat Desa dan Pendataan Aset Desa

- Hasil : Terciptanya Tertib Administrasi Desa dan Tercapainya Target Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

b. Pembinaan Keagamaan/Pelaksanaan MTQ/STQ

Persentase capaian : 100%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 65.420.000,-
Realisasi : Rp. 65.420.000,-
- Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Keagamaan/Pelaksanaan MTQ/STQ
- Hasil : Untuk Mendapatkan Qori' dan Qori'ah Terbaik dan Memberikan Siraman Rohani kepada Masyarakat sebagai Bekal untuk diterapkan dalam Kehidupan Sehari-Hari

c. Pelaksanaan Musrenbang

Persentase capaian : 100%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 850.000,-
Realisasi : Rp. 850.000,-
- Keluaran : Terlaksananya Musrenbang Desa dan Kecamatan
- Hasil : Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat yang akan diusulkan pada Tingkat Kabupaten

d. Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya

Persentase capaian : 92,77%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 10.375.000,-
- Realisasi : Rp. 9.625.000,-
- Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan seni dan budaya
- Hasil : Terjaganya kelestarian seni dan budaya daerah

e. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum

Persentase capaian : 100%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 10.550.000,-
- Realisasi : Rp. 10.550.000,-
- Keluaran : Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
- Hasil : Terciptanya lingkungan yang aman dan tentram dalam masyarakat

f. Pembinaan PKK dan Dharma Wanita Kecamatan

Persentase capaian : 100%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 12.125.000,-
- Realisasi : Rp. 12.125.000,-
- Keluaran : Terlaksananya pembinaan administrasi PKK desa dan kecamatan
- Hasil : Tertatanya administrasi PKK desa dan kecamatan

g. Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Persentase capaian : 100%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 23.550.000,-
Realisasi : Rp. 23.550.000,-
- Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga
- Hasil : Tersedianya kelengkapan PASKIBRA serta lomba-lomba dalam rangka HUT RI ke-71

h. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Penataan Lingkungan

Persentase capaian : 100%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 51.960.000,-
Realisasi : Rp. 51.960.000,-
- Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan lembaga desa dan kelompok usaha
- Hasil : Terciptanya lembaga desa profesional dan kelompok usaha yang mempunyai daya saing usaha

i. Penataan dan Pembinaan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan(PATEN)

Persentase capaian : 100%

Nilai capaian kegiatan : Sangat Berhasil

Uraian keberhasilan :

- Masukan : Besarnya dana yang direncanakan
Rp. 4.080.000,-
Realisasi : Rp. 4.080.000,-
- Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Hasil : Terpenuhinya pelayanan masyarakat

Kriteria penilaian : digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dari indikator kegiatan maupun sasaran.

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Berhasil
II	Lebih dari 70% hingga 90%	Berhasil
III	Lebih dari 50% hingga 70%	Cukup
IV	Lebih dari 30% hingga 50%	Kurang
V	Kurang dari sama dengan 30%	Sangat Kurang

D. Aspek Keuangan

Anggaran Kantor Kecamatan Taliwang Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 10.005.014.329,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.735.959.178,- atau 87,32%.

Adapun rincian dari rencana dan realisasi pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kantor Camat Taliwang Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel
Alokasi dan Realisasi
Anggaran penyelenggaraan urusan wajib pada tahun 2018

URAIAN	ALOKASI	RELISASI	%
BELANJA	Rp. 10.005.014.329,00	Rp. 8.735.959.178,00	87,32
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	Rp. 4.802.771.894,00	Rp. 3.920.916.292,00	81,64 %
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.335.914.535,00	Rp. 4.121.664.986,00	95,06 %
Belanja Hibah	Rp. 62.000.000,00	Rp. 62.000.000,00	100%
BELANJA MODAL	Rp. 804.327.900,00	RP. 631.377.900,00	78,50 %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 598.952.900,00	Rp. 496.702.900,00	82,93 %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 187.475.000,00	Rp. 127.175.000,00	67,84 %
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 17.900.000,00	Rp. 7.500.000,00	41,90 %

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketercapaian sasaran terhadap tujuan yang telah ditetapkan, secara umum program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 telah terealisasi sebesar 96,55 % dari rencana anggaran yang direncanakan, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah sangat berhasil untuk menunjang pencapaian tujuan dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat demi mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Sumbawa Barat. Demikian telah disajikan secara singkat mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 sebagai media pertanggungjawaban SKPD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung sasaran untuk mencapai tujuan, visi dan misi kecamatan maupun kabupaten secara keseluruhan.

4.2. Saran

Untuk meningkatkan capaian kinerja program dan kegiatan pada Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun akan datang, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan kinerja di lingkup unit kerja untuk mengoptimalkan setiap sumber daya guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Pencapaian kinerja yang optimal dari setiap unit kerja, dengan upaya pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai.

3. Dibutuhkan penganggaran yang relevan untuk mendukung program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi.
4. Peningkatan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program pada setiap jajaran pemerintah Kecamatan Taliwang guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat dievaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun akan datang sehingga mendukung optimalisasi pencapaian visi dan misi yang kita citakan.

Taliwang, Februari 2018
Camat Taliwang,

SURYAMAN,S.STP
NIP. 19820320 200112 1 003